

EDISI XL, JULI 2020

■ **“Organization Agility” bagi Lembaga Pendidikan**

Ignasius Triyana

■ **Penerapan Nilai - Nilai Kepemimpinan
Kepala SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama, Muntilan, Magelang**

Sr. Gemma, KYM & Dwiatnodjo Budi Setyarto

■ **Kompetensi Sekretaris di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid -19**

Bambang Susetyo Hastono

■ **Pengelolaan *Website* sebagai Media Informasi Publik oleh
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga**

Ch. Kcemia Dyah Marhaeni

■ **Katekese Umat dengan Metode Pemecahan Masalah menurut
Thomas Coulson Colin**

Henricus Parijo

■ **Tradisi dan Pewarisan Upacara Perarakan Pengantin Bekakak
di Kecamatan Gamping Yogyakarta**

FX. Indrojiono

■ **Komunikasi Krisis di Masa Pandemi Covid-19**

Rendro Laksmono

■ **Multikulturalisme dan Moderasi Beragama dalam Perspektif Agama Katolik**

Paulus Glorie Pamungkas

■ **Pembelajaran Online pada Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19**

Paulus Tri Anung Sutanto

Jurnal Ilmiah Sosial

Caritas Pro Serviam

ASMI SANTA MARIA YOGYAKARTA

Edisi XL Juli 2020

ISSN : 1410-4547

<http://asmistmaria.ac.id/wp/jurnal-charitas-pro-serviam/>

Jurnal Ilmiah sosial Caritas Pro Serviam diterbitkan enam bulan sekali sebagai media publikasi hasil penelitian dan hasil pemikiran para dosen ASMI Santa Maria Yogyakarta. Redaksi juga mengundang para penulis, dosen, guru, praktisi dan professional lain untuk mengisi tulisan di Jurnal ini sebagai wacana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan, implementasi kebijakan, praktik dan seni.

DEWAN REDAKSI

Penanggungjawab:

Yohannes Suraja
Direktur ASMI Santa Maria Yogyakarta

Penyunting Ahli:

R. Kunjana Rahardi
Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta

Penyunting Bahasa:

- Kristina Wasiyati
- Yohanes Maryono

Penyunting Pelaksana:

- Dwiatmodjo Budi Setyarto, Lukas Dwiantara
- Indri Erkaningrum Fl., Bambang Darmadi
- Ch. Kurnia Dyah Marhaeni, De Santo Johannes

Redaktur:

Paulus Glorie Pamungkas

Desain dan Tata Letak:A

Agustinus Iryanto Bowo Prasetyo

Produksi :

F. Isbekti Raharjo

Administrasi dan sirkulasi:

N. Nunung Dwiatma Adhiarta

SALAM REDAKSI

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang berkenan melimpahkan berkat-Nya sehingga kami dapat memroses penerbitan Jurnal Ilmiah Sosial Caritas Pro Serviam Edisi XL Juli 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan karya ilmiah untuk penerbitan ini dan memperbaikinya kembali sesuai catatan editor. Terima kasih pula kami haturkan kepada para editor yang berkenan membaca dan member catatan perbaikan untuk penyempurnaan setiap tulisan.

Berbagai macam topik hasil pemikiran atau pun hasil penelitian tertuang dalam edisi ini sesuai perhatian dan minat penulis kiranya dapat memberi masukan perbaikan atas masalah yang menjadi keprihatinan bagi setiap pembaca dan dapat memberi dasar pertimbangan solusi praktis dan dasar pengembangan kebijakan dan praktik kehidupan untuk kemajuan sosial, ekonomi, organisasi, perusahaan, kantor dan pendidikan Indonesia.

Pemikiran kecil atas berbagai masalah sosial ini kiranya dapat menjadi nyala lilin yang bermanfaat sebagai alat penerang atas masalah sosial sekitar kita.

Salam, Redaksi CPS

DAFTAR ISI

Salam Redaksi

Daftar Isi

“ <i>Organization Agility</i> ” bagi Lembaga Pendidikan Ignasius Triyana	1
Penerapan Nilai-Nilai Kepemimpinan Kepala SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama, Muntilan, Magelang Sr. Gemma, KYM dan Dwiatmodjo Budi Setyarto	22
Kompetensi Sekretaris Di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Bambang Susetyo Hastono	44
“Pengelolaan <i>Website</i> Sebagai Media Informasi Publik oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga” Wida Manggala dan Ch. Kurnia Dyah Marhaeni	66
Katekese Umat Dengan Metode Pemecahan Masalah Menurut Thomas Coulson Colin Henricus Parijo	89
Tradisi Dan Pewarisan Upacara Perarakan Pengantin Bekakak Di Kecamatan Gamping Yogyakarta FX. Indrojiono.	106
Komunikasi Krisis di Masa Pandemi Covid-19 Rendro Laksmono	129
Multikulturalisme dan Moderasi Beragama dalam Perspektif Agama Katolik Paulus Glorie Pamungkas	140
Pembelajaran Online pada Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19 Paulus Tri Anung Sutanto	151

Multikulturalisme Dan Moderasi Beragama Dalam Pandangan Agama Katolik

Paulus Glorie Pamungkas

Abstract

This paper is a study of multiculturalism in Indonesia that is facing problematic conditions today. The experience of the state managing differences is not directly proportional to the field conditions that show an increase in various problems related to various diversity. Multiculturalism is an understanding and way of thinking that needs to be developed continuously by all parties, so that multiculturalism as a philosophy that directs all parties to listen to and understand each other, without having to give up their personal principles and beliefs.

The Catholic Church always encourages the faithful to avoid attitudes that do not reflect the teachings of the Church and the teachings of the Bible, such as extremities and violence, instead the Church teaches togetherness, solidarity, cooperation, religious moderation and peaceful coexistence in differences.

Key words: multiculturalism, Catholic Church, religious moderation.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beraneka ragam penduduk dan budaya. Keragaman Indonesia bukanlah sesuatu yang diminta ataupun ditawarkan, melainkan sesuatu yang diterima begitu saja. Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu negara multikultural di dunia. Multikultural memiliki dua pengertian yang kompleks yaitu “multi” yang berarti plural, “kultural” yang berarti

kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, plural bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi politis, sosial, dan ekonomi (Tilaar: 2004).

Kebenaran dari pernyataan Indonesia merupakan negara multikultural tersebut dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan

luas. Jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari kurang lebih 1.300 suku yang menggunakan hampir 700 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan lainnya.

Realitas Indonesia sebagai bangsa yang plural merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bangsa yang memiliki keanekaragaman agama, etnik, dan kebudayaan merupakan kekayaan yang sekaligus menjadi modal besar dalam pembangunan. Akan tetapi, kekayaan dan keanekaragaman ini juga ibarat pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa pula merugikan. Dikatakan menguntungkan, apabila kekayaan akan keanekaragaman dapat dipelihara dan diberdayakan secara maksimal sehingga memberikan nuansa dan dinamika yang positif serta

membanggakan. Dikatakan merugikan, karena keanekaragaman memungkinkan adanya berbagai konflik. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa konflik intoleransi agama terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal apa pun akar dan sumber persoalannya baik dipicu oleh perbedaan agama, atau suku maupun yang lain. Dalam masyarakat yang majemuk, keberadaan negara dirancang tidak untuk melindungi kaum minoritas, bukan pula membela keberadaan kelompok mayoritas. Eksistensi negara berkewajiban melindungi, mengayomi dan memberikan jaminan keamanan dan ketentraman bagi semua warga negara. Kehadiran institusi negara harus benar-benar dirasakan oleh setiap warganya ketika mereka dihadapkan pada satu situasi yang mengancam kedamaian, keselamatan, dan hak-hak hidupnya yang dijamin oleh undang-undang.

Namun kenyataannya, manakala terjadi konflik yang berbau SARA kehadiran institusi negara terkesan terlambat, penyelesaian yang mengambang, dan solusi yang tidak

jas muaranya. Semboyan “kebhinekaan” di Indonesia yang berarti mengakui adanya pluralitas dalam berbagai sendi kehidupan tidak dapat menjadi jaminan bahwa semua warga sudah terbebas dari ancaman dan intimidasi manakala mereka memiliki perbedaan dalam suatu sendi kehidupan, meskipun identitas yang dimiliki itu adalah hak azazi hidupnya. Kebhinekaan di Indonesia bisa disepadankan dengan sifat multikultur, sehingga paham Bhineka Tunggal Ika memiliki semangat multikulturalisme.

Tulisan ini merupakan kajian mengenai multikulturalisme dari sudut pandang agama Katolik. Dengan pemahaman yang benar mengenai multikulturalisme, penulis berharap agar persatuan dan kesatuan bangsa yang sarat dengan keragaman ini dapat tetap terjaga keutuhannya, dan masyarakat hidup dalam suasana yang nyaman. Diperlukan suatu upaya penguatan kembali kesadaran masyarakat tentang makna multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis juga mengusulkan moderasi beragama sebagai salah satu upaya

meminimalkan konflik horisontal dalam masyarakat plural.

B. Konsep Multikulturalisme

Menurut Bikhu Parekh multikulturalisme adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok budaya yang tentunya memiliki perbedaan sistem makna, nilai, sistem sosialnya, sejarah, tradisi dan kebiasaan (Parekh, 2008, 5). Multikulturalisme adalah sebuah filosofi dan terkadang juga ditafsirkan sebagai ideologi, namun yang pasti itu adalah sebuah konsep tentang upaya yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan yang saling berbeda dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke 19 (Bissondath, 2002).

Istilah multikulturalisme mengandung dua pengertian, yaitu multi yang berarti “plural” dan kulturalisme, yang berarti “budaya”. Istilah plural mengandung arti “berjenis-jenis”, sedangkan istilah pluralisme berarti “di satu sisi pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis, tetapi sisi lain pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi dan budaya”. Dengan demikian, di dalam pengertian multikulturalisme, ada dua ciri utama yang harus dimunculkan: pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*); dan kedua, legitimasi atas keragaman budaya. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menghendaki adanya pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap berbagai keragaman budaya. Secara lebih teknis, istilah multikulturalisme dapat dijelaskan sebagai “sejumlah prinsip, kebijakan dan praksis untuk mengakomodasi keberagaman sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari suatu masyarakat”. Artinya, paham multikulturalisme menunjuk pada upaya untuk menciptakan,

menjamin dan mendorong pembentukan ruang publik yang memungkinkan beragam komunitas dan budaya bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan dan jangkauan masing-masing (Bond, 2006).

Dengan demikian, inti dari multikulturalisme adalah paham yang mendorong semua kelompok budaya dalam masyarakat untuk bersedia menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sederajat tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa maupun agama. Kemunculan multikulturalisme diawali oleh gagasan mengenai perlunya hubungan yang lebih manusiawi dalam relasi kelompok beragam budaya. Gagasan tersebut berpusat pada memperlakukan berbagai kelompok budaya secara sederajat, baik dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok.

Multikulturalisme tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengertian keaneragaman budaya dalam masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme tidak sama dengan masyarakat beragam budaya.

Multikulturalisme menunjuk pada masyarakat beragam budaya yang memiliki pemahaman yang menekankan pada adanya kesederajatan atau kesetaraan di antara berbagai kelompok budaya yang beragam tersebut. Multikulturalisme terkait dengan berbagai gagasan lain, yang mendukungnya, seperti: hak asasi manusia, kebersamaan dan kesederajatan dalam berbagai bidang, hak budaya komunitas dan kelompok minoritas, demokrasi, keadilan, supremasi hukum, kesamaan kesempatan kerja dan berusaha, serta prinsip-prinsip etika dan moral (Budianta, Melani, Burhanuddin (ed):2003)

C. Sekilas tentang Gereja Katolik

“Gereja Katolik” adalah nama resmi umat beragama Katolik. Gereja katolik ditata menurut keuskupan, wilayah yang diketuai oleh seorang uskup di bawah kepemimpinan uskup kota Roma, Paus. Keuskupan dibagi-bagi dalam paroki-paroki, yang masing-masing berpusat pada sebuah Gereja di mana umat beribadat dan dilayani oleh pastor paroki. Orang

menjadi anggota Gereja Katolik melalui ritus pembaptisan. Kebanyakan orang Katolik dibaptis ketika masih bayi, atas prakarsa orang tua. Apabila orang yang mau masuk Gereja sudah berumur tujuh tahun atau lebih, ia sendiri harus mengajukan permintaan dibaptis dan baru akan menerima pembaptisan sesudah “magang”/ ”belajar” selama beberapa waktu, biasanya kurang lebih satu tahun.

Gereja Katolik merupakan bagian dari umat Kristiani di seluruh dunia. Yang mempersatukan semua orang kristiani adalah keyakinan bahwa dalam manusia Yesus, yang hidup dan dihukum mati hampir 2000 tahun lalu, Allah sendiri masuk ke dalam dunia, bahwa Yesus itu adalah Sang Penebus yang dijanjikan dan bahwa, karena itu dalam Yesus itu Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang. Kesamaan iman semua orang kristiani terungkap dalam Credo, suatu rumusan kuno iman Kristiani.

Umat Kristiani sedunia secara garis besar terdiri atas tiga cabang besar: Gereja Katolik, Gereja

Ortodoks, dan Gereja Protestan. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks sama-sama merupakan kelanjutan Umat Awal. Umat Awal adalah umat pertama dibawah pimpinan Petrus, Yakobus dan ke-10 rasul lain pilihan Yesus di Yerusalem. Mereka bersatu dalam kepercayaan bahwa Yesus yang disalibkan atas upaya pimpinan Yahudi oleh penguasa Romawi dibangkitkan oleh Allah dan ditetapkan sebagai Tuhan.

Perpecahan antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks bukan karena perselisihan mengenai ajaran, melainkan sebagai akibat proses panjang saling menjadi asing antara Gereja Barat yang berbahasa Latin dan Gereja-gereja di wilayah Timur Roma (Konstantinopolis) yang berbahasa Yunani. Proses perpecahan itu sudah dimulai di abad ke-4 di mana kekaisaran Roma pecah ke dalam bagian Barat dengan Ravenna dan Bagian Timur dengan Konstantinopolis (Istambul) sebagai ibukota. Gereja-gereja Timur yang selain berbahasa Yunani, juga berbahasa Siria, Koptik, Khaldea dan lain-lain, semakin tidak mengakui primat uskup

Roma. Perpecahan menjadi resmi pada tahun 1054 waktu batrik Konstantinopolis sebagai pemimpin Gereja-gereja Timur dan Paus sebagai pemimpin Gereja Barat, saling mengeluarkan dari kesatuan umat (ekskomunikasi). Sejak itu Gereja-gereja Timur dan Gereja Barat berjalan sendiri-sendiri. Kristianitas Timur pada saat ini terpecah ke dalam 14 Gereja mandiri, di mana Gereja Ortodoks Rusia adalah yang terbesar dengan 150 juta umat. Pada tahun 1965 Paus Paulus VI (sebagai pimpinan Gereja Barat) dan Batrik Anaxagoras, Ketua Kehormatan Gereja Ortodoks, bersama-sama mencabut ekskomunikasi itu (Magnis Suseno, 2019:18.)

Sedangkan Gereja Protestan lahir dalam *reformasi*. “Reformasi Protestan” adalah suatu gerakan protes yang dilancarkan oleh Martin Luther (1483 – 1546) di Jerman dan Jean Calvin (1509 – 1564) melawan Gereja Roma yang dianggap sudah menyeleweng dari ajaran Kristus. Dengan alasan bahwa tidak ada dasar dalam Kitab Suci, Protestantisme menolak segala apa yang khas bagi

Gereja Barat: adanya Paus, uskup dan imamat tertahbis, sakramen-sakramen (ritus-ritus yang memastikan pencurahan rahmat Ilahi bagi yang menerimanya), devosi pada Bunda Maria dan santo-santa. Mereka membersihkan gereja-gereja dari segala gambar dan patung, menghapus ziarah dan kebiasaan tradisional lain seperti pemakaian dupa dan air suci, biara-biara ditutup, dan selibat (ketentuan bahwa imam tidak boleh kawin) dihapus. (Magnis Suseno, 2019:18.)

Dengan lahirnya Protestantisme, kekristenan Barat pecah ke dalam Gereja lama (“Gereja Katolik”) dan dua aliran besar Protestan yang kemudian di abad-abad berikutnya pecah ke dalam lebih banyak gereja dan sekte-sekte. Di abad ke -20, kegerejaan Protestan melahirkan dua gerakan pembaharuan, yakni gerakan Penta-kosta dan Karismatik.

Berbeda dari banyak Gereja lain yang memandang diri sebagai Gereja yang otonom dalam sebuah teritorial tertentu, Gereja Katolik justru memandang dirinya sebagai satu kesatuan Gereja Universal. Meskipun

ada di banyak negara di dunia, Gereja Katolik memandang dirinya sebagai Gereja yang satu dengan 4 sifat Gereja sebagaimana terumuskan dalam syahadat para rasul (credo), yakni: satu, kudus, katolik dan apostolik (lih. Konferensi Waligereja Indonesia, 1996: 344-352).

1. Gereja katolik itu satu. Gereja Katolik percaya akan kehendak Allah bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi Umat Allah (1Ptr 2:5-10) dan menjadi satu Tubuh (1Kor 12:12). Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci Kerajaan Surga. Setelah Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesus pun menyatakan akan mendirikan jemaat-Nya di atas batu karang yang alam maut tidak akan menguasainya (Mt 16:16-19).

Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Lebih tepat bila kesatuan Gereja dimengerti sebagai

“Bhineka Tunggal Ika” baik di dalam Gereja Katolik sendiri maupun dalam persekutuan ekumenis, sebab kesatuan Gereja bukanlah semacam kekompakan organisasi atau kerukunan sosial. Kesatuan Gereja itu pertama-tama kesatuan iman, yang mungkin diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu kesatuan lahiriah bukanlah keseragaman dan kesamaan, melainkan persekutuan dalam persaudaraan, saling meneguhkan dan melengkapi dalam penghayatan iman.

2. Sifat yang kedua adalah kekudusannya, Gereja itu kudus. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, “Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya.” (Mat 5:48)
“Kudus” bukan pertama-tama kategori moral yang menyangkut kelakuan manusia, melainkan kategori teologal (ilahi), yang

menentukan hubungan dengan Allah. Ini tidak berarti bahwa kelakuan moral tidak penting. Apa yang dikhususkan bagi Tuhan, harus “sempurna” dan kesempurnaan manusia tentu terdapat dalam taraf moral kehidupannya.

3. Sifat yang ketiga adalah Katolik (dari kata Latin: *catholicus* yang berarti universal atau umum). Nama ini sudah dipakai sejak awal abad ke II M. pada masa St. Ignatius dari Antiokia menjadi Uskup. Sifat Katolik ini mengandung arti Gereja yang utuh, lengkap. Tidak ada gereja setengah-setengah atau sebagian. Gereja setempat, entah keuskupan ataupun paroki, bukanlah “cabang” Gereja universal. Setiap Gereja setempat, bahkan setiap perkumpulan jemaat beriman yang sah, merupakan “seluruh” Gereja. Gereja tidak dapat dipotong-potong menjadi “Gereja-gereja bagian”. Bersifat universal artinya Gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia di mana setiap orang

menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama di manapun berada.

4. Sifat yang terakhir dari Gereja Katolik adalah apostolik. Dengan sifat ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa Gereja “dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru” (Ef. 2:20). Gereja Katolik mementingkan hubungan historis, turun-temurun, antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Itulah sebabnya Gereja Katolik tidak hanya mendasarkan diri dalam hal ajaran-ajaran dan eksistensinya pada Kitab Suci melainkan juga kepada Tradisi Suci dan Magisterium Gereja sepanjang masa.

Berkaitan dengan konteks multikulturalisme, Gereja Katolik, dari zaman para rasul hingga saat ini, yang ditandai dengan perpecahan Gereja timur dan barat sampai pada reformasi protestan, telah mengalami banyak sekali persoalan. Sejak masalah bersunat atau tidak bersunat antara Perus dan Paulus pada zaman rasuli, penyebaran Kristen ke luar Eropa,

sampai Gereja di era digital sekarang ini Gereja selalu dihadapkan dengan masalah multikulturalisme. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi, bahkan pada abad-abad yang lalu tak jarang banyak umat Katolik yang menjadi martir karena benturan kebudayaan, seperti di Kamboja, Vietnam, Korea dan Jepang. Fakta sejarah ini memperlihatkan bahwa pada banyak zaman Gereja Katolik mengalami juga kesulitan dalamewartakan iman Kristen di antara bangsa-bangsa.

Dalam Gereja Katolik ada paham *extra ecclesiam nulla salus*, di luar Gereja (Katolik) tidak ada keselamatan. Di sini Gereja Katolik menganggap diri superior atas agama-agama serta gereja-gereja lain, dan atas kebudayaan-kebudayaan lain. Hal inilah yang membuat Gereja Katolik sering terlibat konflik dengan Protestan, Islam dan banyak suku bangsa di banyak Negara dan di banyak zaman, yang memakan jutaan korban pada masa-masa yang lampau. Namun ada satu momentum penting yang merubah cara pandang Gereja Katolik tentang dirinya dalam

hubungan dengan dunia, agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan. Momentum itu adalah Konsili Vatikan II, yang berlangsung dari tahun 1962 - 1965. Dalam konsili ini Gereja Katolik mengadakan pembaharuan tentang hakekat dan tujuannya. Pembahasan tentang multikulturalisme ini akan merujuk pada pemahaman Gereja Katolik tentang dunia sesudah Konsili Vatikan II.

D. Pandangan Gereja Katolik tentang multikulturalisme.

Dokumen Konsili Vatikan II yang membahas tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen adalah *Nostra Aetate*. Dalam dokumen tersebut, Gereja Katolik menyadari bahwa “Semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga memiliki satu tujuan akhir, yakni Allah” (*Nostra Aetate* [NA], art. 1. par 2). Inilah yang dipahami sebagai sebuah finalitas atau tujuan akhir. Finalitas segala sesuatu ditempatkan pada diri Allah. Dalam hal ini, setiap

agama dan kepercayaan memiliki finalitas yang satu dan sama yaitu Allah sendiri. Pun demikian berarti finalitas dari keberadaan manusia sebagai pemeluk agama adalah Tuhan itu sendiri. Gereja Katolik tidak menolak setiap hal yang baik dan suci dari berbagai agama dan kepercayaan yang lain. Gereja Katolik menyadari bahwa di dalam agama dan kepercayaan lain terdapat berbagai cara hidup, kaidah kehidupan, maupun ajaran-ajaran yang “tidak jarang memantulkan sinar Kebenaran yang menerangi semua orang” (*Nostrae*, art. 1. par 2).

Oleh karena itu, sikap yang ingin dikembangkan oleh Gereja Katolik terhadap kepercayaan dan atau agama-agama lain adalah mengadakan “dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta perihidup kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka”(*Nostrae*. art. 2 par. 3). Gereja Katolik tidak memandang dirinya sebagai kebenaran yang satu-

satunya. Kebenaran iman memiliki berbagai bentuk dan jalan. Yang lain dipandang oleh Gereja Katolik sebagai bagian dari diri yang sederajat untuk mengarahkan diri kepada finalitas dari segala sesuatu yaitu Allah sendiri. Di dalam cara pandang seperti itu, tidak dikembangkan sikap kebencian dan permusuhan ataupun persaingan terhadap agama ataupun orang yang memeluk agama lain. Gereja dengan tegas “mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama” (Nostrae. art. 5 par. 3).

Dalam konteks Indonesia terdapat Hasil Sidang Tahunan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 4 – 14 November 2019 yang berjudul: Persaudaraan Insani untuk Indonesia Damai. Gereja Katolik Indonesia menyadari adanya penyebaran paham dan gerakan ekstremisme di Indonesia. Di sisi lain Gereja juga semakin menemukan berbagai peluang untuk memperkuat persaudaraan antar umat manusia. “Kita bersyukur kepada Tuhan karena memiliki bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945, yang dijiwai semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua itu menjadi pilar-pilar utama dalam membangun tata kehidupan bersama yang harmonis di tengah keanekaragaman agama, suku, dan golongan. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan dan anugerah Ilahi yang harus dirawat dan dikembangkan dengan sikap saling menerima, menghargai, dan bekerja sama satu dengan yang lain.”

Persoalan yang memprihatinkan dan menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia saat ini adalah semakin berkembangnya paham ekstremisme yang sering berujung pada tindakan terorisme. Penyebab utama lahirnya ekstremisme adalah lemahnya pemahaman ideologi berbangsa dan bernegara yang berkorelasi dengan persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebencian terhadap pihak-pihak yang dianggap menghalangi penyebaran ideologi tersebut. Di tengah berbagai persoalan tersebut di atas, Gereja sebagai persekutuan umat beriman sekaligus bagian dari bangsa Indonesia dipanggil

dan diutus untuk turut terlibat dalam mempromosikan, memperjuangkan, dan mewujudkan persaudaraan insani sebagai kekayaan bersama (bdk. Kis 4:32). Persaudaraan insani ini dibangun atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang diinternalisasikan secara personal dan dihidupi dalam relasi sosial (<https://www.dokpenkwi.org>)

E. Moderasi Beragama

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Untuk menghindari disharmoni dalam hal keberagaman, perlu ditumbuhkan cara beragama

yang moderat, cara beragama yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut moderasi beragama.

Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan mengambil ‘jalan tengah’, atau tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian moderasi beragama merupakan jalan tengah di tengah keragaman agama di Indonesia. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggangrasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Moderasi beragama penting dilaksanakan bagi bangsa Indonesia, karena pluralitas bangsa ini yang merupakan keniscayaan. Keragaman di Indonesia tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi beragama adalah untuk mencari persamaan bukan mempertajam perbedaan.

Berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dalam keragaman agama, suku, faham dan sebagainya telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa Bangsa yang menetapkan tahun 2019 sebagai "Tahun Moderasi Internasional"/*The International Year of Moderation* (<https://www.un.org>). Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen Kementerian Agama untuk terus menggaungkan moderasi beragama (Akhmadi: 2019).

F. Moderasi beragama dalam perspektif Gereja Katolik.

Gereja Katolik menyebut diri sebagai "persekutuan iman, harapan dan cinta kasih". Ketiga keutamaan tersebut, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama.

Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili

Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah *Nostrae Aetate*. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekret *Nostra Aetate* menandakan bahwa "Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang baik dan suci dari berbagai agama dan kepercayaan yang lain, seperti sudah diuraikan di depan. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui dekret *Nostra Aetate* (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap

kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen.

Dalam konteks Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan “perbedaan” antar-agama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antaragama yang kerap kali dilanda oleh berbagai konflik. Hal tersebut juga didukung oleh dokumen konsili Vatikan II *Ad Gentes*: “Agar mereka mampu memberi kesaksian tentang Kristus secara berhasil, (kaum kristiani) harus bergabung dengan orang zamannya dengan hormat dan kasih, dan mengakui diri sendiri sebagai anggota-anggota kelompok orang, di antara siapa mereka hidup. Mereka harus berbagi dalam kehidupan kultural dan sosial dengan pelbagai hubungan dan urusan kehidupan insani. Karena itu mereka harus mengenal tradisi religius dan kultural orang lain, bahagia

menemukan dan siap sedia menghormati benih-benih Sabda yang tersembunyi di dalam mereka ... Seperti Kristus sendiri .. demikian pula para murid-Nya harus mengenal orang-orang di antara siapa mereka hidup. Mereka harus menjalin hubungan dengan orang-orang itu, belajar dengan dialog yang tulus dan sabar, tentang kekayaan apa yang dilimpahkan Allah kepada bangsa-bangsa di bumi ini. Sekaligus mereka harus mencoba menerangi kekayaan ini dengan cahaya Injil, membebaskannya, dan membawanya ke dalam kerajaan Allah Sang Penyelamat” (AG 11).

G. Penutup

Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan dalam masyarakat plural. Moderasi beragama merupakan usaha untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah pelbagai ketegangan, seperti klaim kebenaran absolut terhadap suatu ajaran agama.

Moderasi beragama diperlukan bangsa sebagai strategi

kebudayaan merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila.

Gereja Katolik berprinsip bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk saling mengisi dan melengkapi, sehingga umat dapat memiliki kesadaran multikultur

terhadap segala perbedaan di dalam berbagai suku, budaya, adat, kebiasaan serta geografis yang berbeda-beda.

Gereja Katolik senantiasa mendorong umat beriman harus menghindari sikap-sikap yang tidak mencerminkan ajaran Gereja dan ajaran Alkitab, sebaliknya untuk menanamkan kebersamaan, solidaritas, kerjasama dan hidup berdampingan secara damai di dalam perbedaan.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, Agus, 2019, *Moderasi Beragama dalam keragaman Indonesia*, dalam Jurnal Diklat Keagamaan, Vol 13, no 2, Februari-maret 2019
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*
- Bissondath, Neil. 2002. *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism*, Toronto: Penguin
- Bond, Ross. 2006. "Belonging and Becoming: National Identity and Exclusion", *Sociology*, Vol. 4 (40)
- Budianta, Melani, Burhanuddin (ed), *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum dalam Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta; Indonesian Institute for Civil Society (INCIS) bekerjasama dengan CSSP-USAID, 2003).
- Konferensi Waligereja Indonesia, 1996, *Iman Katolik*, Obor, Jakarta Pusat
- Magnis-Suseno, Franz, 2004, *Menjadi saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, Jakarta, Obor
- Magnis-Suseno, Franz, 2019, *Katolik Itu Apa*, Yogyakarta, Kanisius

Parekh, *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, diterjemahkan dari *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, oleh Bambang Kukuh Adi (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

Seri Dokumen Gerejawi no. 13, 1991, *Ad Gentes, Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II*, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta

Seri Dokumen Gerejawi no. 19, 1992, *Dignitatis Humanae dan Nostra Aetate, Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II*, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta

Seri Dokumen Gerejawi no. 85, 2016, *Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II*, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta

Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

<https://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm> Resolutions Promoting Moderation, Establishing International Day of Living Together in Peace Adopted by General Assembly